

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LUMAJANG

2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, sehingga penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2024 - 2026 dapat terselesaikan.

Dalam Pelaksanaan kajian penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 - 2026 banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik fasilitas, pikiran maupun tenaga. Untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada yan terhormat :

1. Kepala Dinas/Instansi terkait beserta staf yang telah membantu memberikan pelayanan dan informasi guna penyelesaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 - 2026;
2. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2024 - 2026.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2024 - 2026 ini disusun untuk mendapatkan dokumen yang strategis yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang keadaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan urusan pendidikan yang lebih baik.

Akhirnya kami menyadari, bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2024 - 2026 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat konstruktif selalu kami terima guna kesempurnaan pada Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tahun berikutnya.

Lumajang, Mei 2023

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil


AGUS WARSITO UTOMO, S.Pd., M.Si
NIP. 19650819 199203 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	36
2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan	37
2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	38
2.7 Kerjasama Perangkat Daerah.....	39
Bab III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
3.2 Isu Strategis	46
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran	48
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	52
Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi Pembangunan	65
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan	65
Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	66
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra	69
7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	71
Bab VIII PENUTUP	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 3 tahun. Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2024–2026 merupakan landasan bagi penentuan arah kebijakan, serta menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Lumajang dan telah mengacu pada kebijakan yang dituangkan dalam RPD 2024-2026. Renstra ini disusun dalam rangka menentukan arah, tujuan, sasaran dan masa depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan 1 urusan tersebut diatas secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 3 tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. satu urusan yaitu Urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan pelaksanaan penataan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara Nasional diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sebagai wujud dari pembangunan system ini, maka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang sudah barang tentu harus mendapatkan dukungan secara operasional dari semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Disamping itu tuntutan masyarakat harus tetap memperhatikan dalam Pembangunan Kependudukan hal ini merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Karakteristik pembangunan dibidang kependudukan antara lain dilaksanakan melalui pelayanan prima bidang kependudukan dengan mengedepankan pelayanan cepat, tepat dan efisien rangka mewujudkan penduduk makmur, berdaya saing dan bermartabat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024–2026 ini disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional maupun pembangunan di Kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana Keputusan Lembaga Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016, tentang Kartu Identitas Anak.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang;
25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.
27. Peraturan Bupati Lumajang No Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2024–2026 ini menjadi rancangan pembangunan bidang administrasi kependudukan yang disusun dan diperuntukkan bagi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang. Selain itu, juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah bidang Kependudukan di Kabupaten Lumajang untuk periode 2024-2026.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat dirumuskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 sebagai berikut.

- 1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026
 - a. Memberikan gambaran tentang pelayanan, sumberdaya,

dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, beserta tantangan dan peluang pengembangan layanannya;

- b. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lumajang dan keterkaitannya dengan upaya pembangunan pelayanan kependudukan untuk jangka waktu tiga tahun mendatang;
- c. Penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, disertai dengan gambaran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang

- a. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi jajaran pejabat struktural, staf, dan kelompok fungsional, di lingkungan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja);
- b. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi bidang dalam menentukan pelaksanaan administrasi kependudukan di wilayah kerjanya;
- c. Memberikan acuan dan wawasan kepada pelaku dan pemangku kepentingan bidang administrasi kependudukan dalam merencanakan kegiatan, dan mengusulkan ide-ide kreatif maupun mengembangkan sikap kritis yang memberikan kemanfaatan bagi upaya, dan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Lumajang.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4. Kelompok Sasaran Layanan
	2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
	2.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
	2.7. Kerjasama Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2. Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
	4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	7.1. Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
	7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Pada Umumnya Struktur Organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian kunci dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

A. Tugas

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

B. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang adalah :

1. penyusunan program dan anggaran;
2. pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;

4. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
5. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
8. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil ;
9. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
10. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
11. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
12. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
13. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
14. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang berdasarkan dasar hukum yang disebutkan pada paragraf pertama dengan susunan sebagai berikut :

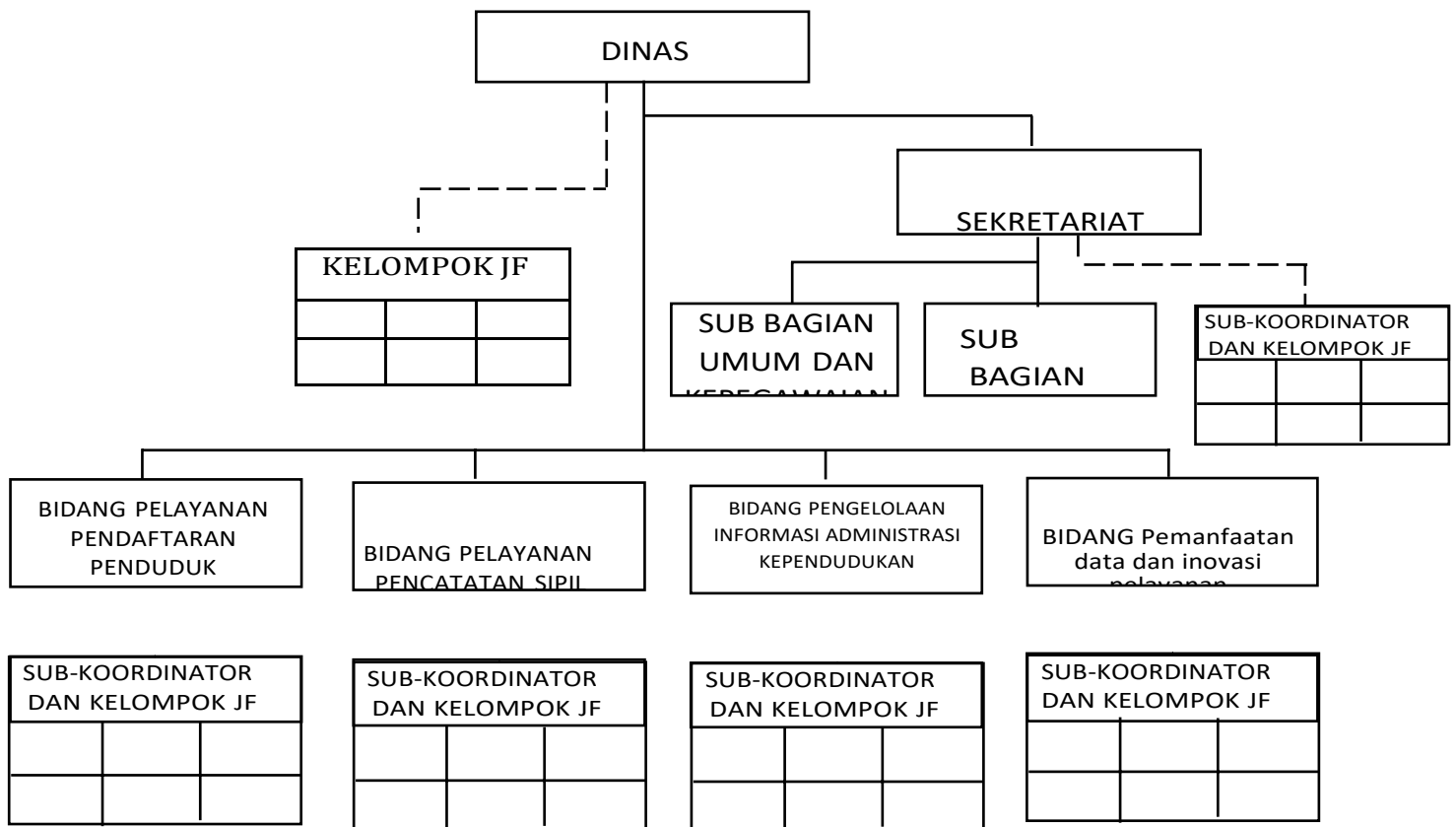
- a. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub bagian Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional

c. Unsur Pelaksana yaitu :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Pendaftaran Penduduk;
- 3) Bidang Pencatatan Sipil;
- 4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 5) Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan

Bagian Sekretariat yang dipimpin Sekretaris membawahi Kepala Sub Bagian, dan masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Sub Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Secara terperinci Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2022, adalah sebagai berikut



Bagan 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.1 **Sekretariat**

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat, mempunyai fungsi :

1. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
2. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
3. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
4. pengelolaan urusan rumah tangga;
5. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
6. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
7. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
8. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas;
9. pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
10. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
11. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
13. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas;
14. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.2 **Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
2. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi
4. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
5. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
6. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
7. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.3 **Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
2. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi

- pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
4. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 5. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
 6. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
 7. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
 8. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas; dan
 9. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.4 **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

1. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
2. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data

kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
4. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
5. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
6. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas; dan
7. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.5 **Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
2. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
5. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
6. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
8. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas;
9. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris dan 4 Kepala Bidang. Sekretaris dibantu oleh 2 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Kepala Bidang dibantu oleh 3 orang Jabatan Fungsional.

Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sampai saat ini baik Fungsional maupun Struktural sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Kepegawaian

NO	JABATAN STRUKTURAL	JML	PANGKAT/GOL. RUANG	JML	PENDIDIKAN FORMAL	JML
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas	1	Pembina Tingkat I (IV / b)	2	S.2	4
2	Sekretaris	1	Pembina (IV/b)	4	S.1	8
3	Kepala Bidang	4	PenataTk.I (III/d)	6	D-IV	1
4	Sub Bag	2	Penata (III/c)	6	D-III	4
5	Pejabat Fungsional	8	Penata (III/b)	3	D-II	
6	Staf	6	Pengatur Tk.I (II/d)		D-I	
			Pengatur (II/c)	2	SLTA	9
			Juru (I/c)		SD	1
		21	Jumlah Total		Jumlah Total	21

Jumlah Personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada berjumlah 106 terdiri dari PNS 21 orang dan Tenaga Kontrak (Honorar) 85 orang dengan jumlah Perempuan sebanyak 46 orang dan Laki-laki sebanyak 60 orang, jumlah kendaraan operasional roda 4 = 5 unit dan roda 2 = 23 unit. Pembangunan jaringan teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang ada terus dikembangkan guna menunjang kelancaran program kependudukan maka perangkat keras dan perangkat lunak serta jaringan komunikasi data dari tingkatan kecamatan sampai dengan pusat harus memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk menggambarkan kinerja layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dapat dilakukan dengan menguraikan berbagai capaian pembangunan Administrasi Kependudukan yang berhasil diraih Kabupaten Lumajang periode 2018-2023.

Berikut hasil evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018-2023 ditunjukkan dengan tabel TC-23 berikut:

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan format seperti dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 T-C.23																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			
Kabupaten Lumajang																			
No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran penduduk				75	80	85	90	95	86	76	88,89	87,91	n/a	114,66	95,5	104,6	97,7	n/a
2	Persentase Penerbitan Dokumen Cakil				75	80	85	90	95	195	279	88,89	115	n/a	260	348,75	104,6	127,8	n/a
3	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SIAK				N/A	N/A	80	85	90	N/A	N/A	99	69	N/A	N/A	N/A	123,75	81,2	n/a
4	Persentase Pengguna Profil Kependudukan				N/A	N/A	80	85	90	N/A	N/A	100	0	N/A	N/A	N/A	125,0	0,0	n/a
5	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				N/A	N/A	80	85	0	N/A	N/A	96	67	N/A	N/A	N/A	120,0	78,8	n/a

Tabel 2.3 T-C.24																			
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			
Kabupaten Lumajang																			

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Tidak Langsung	2.595.798.590,00	2.255.835.524,00	2.937.309.292,00	3.096.647.328,00	3.017.649.603,00	2.456.343.933,00	2.242.610.253,00	2.926.434.181,00	3.037.000.409,00	
Belanja Langsung	11.109.931.000,00	8.981.677.800,00	5.877.286.762,00	4.933.693.403,00	5.484.648.615,00	9.873.381.992,00	8.205.477.917,00	5.496.707.917,40	4.748.841.651,00	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.330.713.000,00	6.085.744.100,00				4.687.438.241,00	5.395.956.783,00			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.748.450.000,00	388.687.500,00				3.202.703.801,00	366.368.434,00			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	58.098.000,00	47.034.000,00				51.108.000,00	44.674.000,00			
Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	352.395.000,00	392.694.000,00				349.692.500,00	389.149.000,00			
Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.127.660.000,00	419.982.000,00				1.112.797.000,00	419.944.000,00			
Program Pengelolaan dan Pengembangan SIAK	306.740.000,00	1.339.658.000,00				285.175.450,00	1.284.344.500,00			
Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi	185.875.000,00	307.878.200,00				184.467.000,00	305.041.200,00			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.154.190.762,00	2.923.788.403,00	3.253.795.615,00			3.773.922.417,40	2.739.477.651,00	
Program Pendaftaran Penduduk			331.356.000,00	468.696.000,00	453.356.000,00			331.332.000,00	468.658.000,00	
Program Pencatatan Sipil			272.960.000,00	427.720.000,00	433.059.000,00			272.865.500,00	427.604.000,00	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1.118.780.000,00	1.113.489.000,00	1.333.983.000,00			1.118.588.000,00	1.113.102.000,00	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan					10.455.000,00			-	-	
Total Belanja	13.705.729.590,00	11.237.513.324,00	8.814.596.054,00	8.030.340.731,00	8.502.298.218,00	12.329.725.925,00	10.448.088.170,00	8.423.142.098,40	7.785.842.060,00	

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
94,63	99,41	99,63	98,07	-	2.780.648.067,40	2.665.597.194,00
88,87	91,36	93,52	96,25	-	7.277.447.516,00	7.081.102.369,35
87,93	88,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	5.708.228.550,00	5.041.697.512,00
85,44	94,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.068.568.750,00	1.784.536.117,50
87,97	94,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	52.566.000,00	47.891.000,00
99,23	99,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	372.544.500,00	369.420.750,00
98,68	99,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	773.821.000,00	766.370.500,00
92,97	95,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	823.199.000,00	784.759.975,00
99,24	99,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	246.876.600,00	244.754.100,00
#DIV/0!	#DIV/0!	90,85	93,70	-	3.443.924.926,67	3.256.700.034,20
#DIV/0!	#DIV/0!	99,99	99,99	-	417.802.666,67	399.995.000,00
#DIV/0!	#DIV/0!	99,97	99,97	-	377.913.000,00	350.234.750,00
#DIV/0!	#DIV/0!	99,98	99,97	-	1.188.750.666,67	1.115.845.000,00
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	10.455.000,00	-
89,96	92,98	95,56	96,96	-	9.746.699.563,35	6.664.268.104,59

Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa secara kinerja dan anggaran terjadi peningkatan dalam realisasinya baik secara kinerja dan secara anggaran meskipun setiap tahun terjadi penurunan anggaran yang signifikan. Tapi hal ini menjadi tantangan dalam perangkat daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan daerah agar terus dapat memberikan kinerja pelayanan yang semakin maksimal.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

JENIS-JENIS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Secara umum adapun layanan administrasi kependudukan meliputi :

1. LAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti dari anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Pasal 1 Angka 7 Permendagri No 2 Tahun 2016).

2. LAYANAN AKTA KEMATIAN

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh pihak duka melalui Desa di domisili penduduk kepada pelaksana setempat. Pencatatan Kematian dan penerbitan akta kematian didasarkan pada keterangan kematian dari pihak yang berwenang atau Desa/Kelurahan.

3. LAYANAN AKTA KELAHIRAN

Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selebar kertas yang sudah dicetak.

4. LAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

5. LAYANAN AKTA PERCERAIAN

Akta perceraian adalah suatu bukti outentik tentang putusannya suatu ikatan perkawinan. Apabila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perceraian harus melalui Pengadilan Negeri, yang telah menjadi kekuatan hukum yang pasti, baru dicatatkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang berjalan dan telah diperuntukan.

6. LAYANAN KARTU KELUARGA

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Setiap terjadi perubahan karena mutasi data dan mutasi biodata, wajib dilaporkan kepada Dinas terkait dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau belum

berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalam Kartu Keluarga.

7. LAYANAN KTP-EL

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP.

8. LAYANAN PINDAH DATANG

Mengurus kepindahan seseorang ke alamat tempat tinggal secara permanen. Bagi penduduk yang hendak pindah tempat tinggal, maka harus mengurus surat keterangan pindah datang. Peraturan tentang pindah datang/ pindah domisili tertuang dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018, yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2018. Perpres tersebut diketahui merupakan substitusi dari Perpres 25 Tahun 2008. Penduduk yang pindah tempat tinggal wajib memenuhi syarat-syarat administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

9. LAYANAN VALIDASI DAN VERIFIKASI DATA

Validasi Data Penduduk merupakan sebuah kegiatan pemutakhiran /coklit (pencocokan dan penelitian) data kependudukan yang langsung melibatkan masyarakat guna memastikan kecocokan data, setiap masyarakat dapat melakukan validasi dan verifikasi data untuk digunakan dalam pemanfaatan kegiatan sehari-hari misal untuk pengurusan BPJS, Bansos atau lainnya

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam pemberian layanan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mitra dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.

2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk saat ini masih belum mendapatkan dukungan dari BUMD di Kabupaten Lumajang.

2.7 Kerjasama Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu masa pembangunan 2018-2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang telah bekerja sama dengan beberapa pihak diluar pemerintahan Kabupaten Lumajang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang juga berharap semakin banyak pihak-pihak lain yang dapat memberikan kerjasama dalam pencapaian pembangunan di Kabupaten Lumajang khususnya dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH di KABUPATEN LUMAJANG

Tabel 2.4 (Perangkat Daerah yang sudah PKS dan Hak Akses Tahun)

NO	NAMA OPD	KETERANGAN
1	Dinas Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)	8 OPD yang disetujui untuk Hak Akses dan PKS sesuai dengan : Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal : 21 September 2020 Nomor : 470/9422/Dukcapil tentang Hak Akses Data Kependudukan untuk 8 (delapan) OPD Kabupaten Lumajang , tetapi belum
2	Dinas Kesehatan	
3	DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	
4	Dinsos (Dinas Sosial)	
5	BPRD (Badan Pajak dan	

	Retribusi Daerah)	berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan .
6	RSI (Rumah Sakit Islam)	
7	RSUD dr. Haryoto	
8	RSUD Pasirian	

Tabel 2.5 Perangkat Daerah yang sudah PKS dan Hak Akses

NO	NAMA OPD	KETERANGAN
1	Disnaker (Dinas Tenaga Kerja)	7 OPD yang disetujui untuk Hak Akses dan PKS sesuai dengan : Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal : 28 Januari 2021 Nomor : 470/995/Dukcapil tentang Hak Akses Data Kependudukan untuk 7 (tujuh) OPD Kabupaten Lumajang , dan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
2	DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	
3	Dinas Pertanian	
4	Dinas Pendidikan	
5	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
6	BKD (Badan Kepegawaian Daerah)	
7	RS. Djatiroto	

Tabel 2.6 Perangkat Daerah yang sudah PKS dan Hak Akses Tahun 2022 (penyesuaian metode baru)

NO	NAMA OPD	KETERANGAN
1	Bappeda (Badan Perencanaan dan Pendapatan Daerah)	Hak Akses dan PKS disetujui sesuai dengan : Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal : 13 Juni 2022 Nomor : 470/9529/Dukcapil tentang Hak Akses Data Kependudukan untuk Badan Perencanaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang dan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
2	Dinas Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Hak Akses dan PKS disetujui sesuai dengan : Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal : 13 Juni 2022 Nomor : 470/9534/Dukcapil tentang Hak Akses

NO	NAMA OPD	KETERANGAN
		Data Kependudukan untuk 4 (empat) OPD Kabupaten Lumajang dan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
3	Dinas Kesehatan	Hak Akses dan PKS disetujui sesuai dengan : Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal : 16 Maret 2022 Nomor : 470/9534/Dukcapil tentang Tanggapan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang tetapi harus ada pengajuan ulang dikarenakan adanya perubahan nomenklatur OPD yang baru yaitu menjadi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Belum disetujui
5	Dinsos (Dinas Sosial)	Hak Akses dan PKS disetujui sesuai dengan : Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal : 16 Maret 2022 Nomor : 470/9534/Dukcapil tentang Tanggapan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang tetapi harus ada pengajuan ulang dikarenakan adanya perubahan nomenklatur OPD yang baru yaitu menjadi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah)	Hak dan PKS disetujui sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal : 13 Juni 2022 Nomor : 470/9534/Dukcapil tentang Hak Akses Data Kependudukan untuk 4 (empat) OPD Kabupaten Lumajang dan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
7	RSI (Rumah Sakit Islam)	Belum disetujui

NO	NAMA OPD	KETERANGAN
8	RSUD dr. Haryoto	Hak Akses dan PKS disetujui sesuai dengan : Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal : 13 Juni 2022 Nomor : 470/9534/Dukcapil tentang Hak Akses Data Kependudukan untuk 4 (empat) OPD Kabupaten Lumajang dan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
9	RSUD Pasirian	Hak Akses dan PKS disetujui sesuai dengan : Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal : 13 Juni 2022 Nomor : 470/9534/Dukcapil tentang Hak Akses Data Kependudukan untuk 4 (empat) OPD Kabupaten Lumajang dan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

LINTAS SEKTOR, LEMBAGA, KBIH dan KLINIK BERSALIN (KB) di KABUPATEN LUMAJANG

Tabel 2.7 Lintas Sektor yang sudah PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	NAMA LEMBAGA	TANGGAL PKS	NAMA PKS
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lumajang dengan Kepolisian Resort Lumajang	23 Maret 2020	-
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lumajang dengan Kantor Pos Lumajang	15 Juni 2020	ANTA KUSUMA (Antar Dokumenku sampai ke rumah)
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lumajang dengan Kementerian Agama	07 Maret 2021	PELAMINAN SIAGA (Sistem Integrasi Administrasi Kependudukan dengan Kementerian Agama Kab. Lumajang)
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lumajang dengan Pengadilan Agama	19 Maret 2021	SIPALUKU (Sistem Integrasi Pengadilan Agama Lumajang dengan Data Kependudukan)

Tabel 2.8 Lembaga yang sudah PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	NAMA MEDIA ELEKTRONIK	TANGGAL PKS	KETERANGAN
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lumajang dengan LKKNU	16 Desember 2021	(Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdatul Ulama)
2	Radio Gloria Paramita Sempurna	20 Januari 2022	Aktif
3	Radio Semeru Fm	20 Januari 2022	Aktif
4	Radio Suara Lumajang	20 Januari 2022	Aktif
5	Radar Semeru Lumajang	20 Januari 2022	Aktif

Tabel 2.9 KBIH yang sudah PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	NAMA KBIH	TANGGAL PKS	KETERANGAN
1	KBIH Wardha	16 Februari 2019	
2	KBIH Almabrur	16 Februari 2019	
3	KBIH Arofah	16 Februari 2019	
4	KBIH Bustanul Ulum	16 Februari 2019	
5	KBIH Alharomain	16 Februari 2019	
6	KBIH Miftahul Ulum	16 Februari 2019	

Tabel 2.10 Klinik Bersalin (KB) yang sudah PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	NAMA Klinik Bersalin (KB)	TANGGAL PKS	KETERANGAN
1	Klinik Bersalin Bundha Elsa	23 September 2018	
2	Klinik Nahadha Medhica	16 Februari 2019	

PKS (PERJANJIAN KERJA SAMA) tentang PEMANFAATAN KIA (KARTU IDENTITAS ANAK) dengan PELAKU USAHA di KABUPATEN LUMAJANG

Tabel 2.11 Pelaku Usaha yang sudah PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	NAMA PELAKU USAHA	TANGGAL PKS	KETERANGAN
1	Toko Metro Collection	03 Juni 2022	
2	drg. Dimas Bramanto Satrya Utama	22 Juni 2022	
3	CV. Bina Bangsa (Togamas Lumajang)	22 Juni 2022	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan analisis internal dan eksternal maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diidentifikasi yang meliputi kelemahan dan tantangan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan sebagai berikut, antara lain:

Tabel 3.1 Penetapan Isu PD (T-B.35)

Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya memadai
		Belum optimalnya sosialisasi dokumen adminduk (KIA)
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana kebijakan strategik pemerintah Kabupaten Lumajang dalam urusan administrasi kependudukan berarti beban kerja, fungsi, dan peran manajemen organisasi ini semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Tupoksinya, melalui perencanaan strategis yang berbasis isu-

isu strategis yang diidentifikasi dari adanya kesenjangan antara kondisi nyata saat ini tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan di tahun 2026. Bertolak dari isu-isu strategis tersebut akan disusun rencana strategis yang realistis dan strategis.

Berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan , maka dirumuskan isu-isu strategia yang dikelompokkan menurut aspek manajemen meliputi :

- 1) Perencanaan dan evaluasi kinerja,
- 2) Pelaksanaan dan pengendalian,
- 3) Sumber daya manusia,
- 4) Kebijakan pemerintah atau regulasi dan
- 5) Sarana dan prasarana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPD Kabupaten Lumajang dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut : **“Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi”**.

b. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPD Kabupaten dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2024–2026 sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)”.

Tabel 4.1 T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi		Indeks pelayanan publik	Angka	Hasil penghitungan Indeks pelayanan publik kabupaten	81 (Sangat Baik)	83 (Sangat Baik)	85 (Sangat Baik)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Persentase Jumlah Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan yang dicetak sahaja(satu hari jadi)	%	Jumlah Dokumen Adminduk yang sudah diterbitkan sahaja (satu hari jadi)x100 Target Sasaran Dokumen Adminduk yang seharusnya diterbitkan	89	90	92
				(Catatan:kriteria layanan sahajaKK,KTP,KIA,SURAT PINDAH,AKTA)			

4.2 Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 – 2026

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka disusunlah Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024–2026 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Cascading Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator
Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Sesuai standar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran
Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Meningkatnya kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai standar	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Meningkatnya kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai standar	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai standar	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator
	Lainnya	
Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai standar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sesuai standar	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran pendudukan
Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk sesuai standar	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani pendaftaran penduduk sesuai standar
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Meningkatnya kualitas Penataan pendaftaran penduduk sesuai standar	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pendaftaran penduduk sesuai standar	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang terlayani Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator
	Penduduk	
Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk
Meningkatnya kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sesuai standar	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Nilai IKM Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk
Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil Sesuai standar	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Capil
Meningkatnya kualitas pelayanan Pencatatan Sipil sesuai standar	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen Akte Kelahiran
		Persentase Kepemilikan dokumen Akta Perkawinan
		Persentase Kepemilikan dokumen Akta Perceraian
		Persentase Dokumen Perubahan Status Anak yang Diterbitkan
		Persentase Kepemilikan Dokumen Perubahan Pewarganegaraan
		Persentase Kepemilikan Dokumen Kematian
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pencatatan Sipil sesuai standar	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang terlayani Pencatatan Sipil Sesuai Standar

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil sesuai standar	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Pelayanan Pencatatan Sipil
Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
Terselenggaranya PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Sesuai standar	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga yang telah memanfaatkan informasi administrasi kependudukan
Meningkatnya kualitas Data Kependudukan yang disajikan sesuai standar	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang disajikan sesuai standart
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator
Meningkatnya kualitas dokumen tata cara pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang sesuai dengan standar	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen tatacara pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang sesuai dengan standar
Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun
Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan sesuai standar	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah Yang Mengimplementasikan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan
Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator
Meningkatnya kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai standar	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Nilai IKM Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
Terselenggaranya pemanfaatan PROFIL KEPENDUDUKAN Sesuai standar	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan Profil Kependudukan
Meningkatnya kualitas profil Kependudukan sesuai standar	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Ketercukupan komponen data dalam profil kependudukan
Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis merupakan proses perumusan langkah-langkah strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan pada kurun waktu tahun-tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mengantisipasi perkembangan dimasa depan. Untuk merumuskannya, didahului dengan analisis lingkungan internal dan eksternal yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pada lingkup lokal, nasional maupun global.

Adapun strategi yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 T-C.26 Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Meningkatkan pelayanan publik yang holistik dengan fokus pada pemenuhan operasional perkantoran pemerintah, pelayanan administrasi yang sesuai SOP, dan pengelolaan arsip yang baik untuk mendukung pelayanan publik yang prima.	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing

5.1 Strategi Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026

Strategi memberikan gambaran tentang upaya dan langkah-langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan strategi pembangunan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024–2026 yaitu Meningkatkan pelayanan publik yang holistik dengan fokus pada pemenuhan operasional perkantoran pemerintah, pelayanan administrasi yang sesuai SOP, dan pengelolaan arsip

yang baik untuk mendukung pelayanan publik yang prima. Dengan demikian maka Standar Pelayanan Minimal Kependudukan bisa terpenuhi.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 - 2026

Berdasarkan sasaran dan strategi pembangunan daerah di bidang Administrasi Kependudukan di atas, dipetakan arah kebijakan Kependudukan yang akan diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang yaitu:

“Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing”

Selanjutnya berdasarkan arah kebijakan yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, dikembangkan program-program Administrasi Kependudukan untuk diaplikasikan dan diharapkan membawa kemajuan dalam membangun Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lumajang.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Program Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang telah ditetapkan nomenklaturnya, untuk dapat mewujudkan tujuan, sasaran, kebijakan Perangkat Daerah maka ditempuh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel Tabel 6.1 T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
								9.093.777.097		12.233.154.764		10.156.470.239						
X	X X	1			Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Sesuai standar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang terpenuhi -----x 100% Fasilitasi Operasional Perkantoran yang rencanakan	66,66	90	6.132.317.025	90	9.141.765.352	90	7.098.600.827	90	22.372.683.204
X	X X	1	20 1		Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	Jumlah fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi -----x 100% Jumlah fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang direncanakan	100	90	8.832.000	90	13.000.000	90	14.000.000	90	35.832.000

Kode					Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X	XX	1	201	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	4 Dokumen	2.208.000	4 Dokumen	2.600.000	4 Dokumen	2.800.000	8 Dokumen	7.608.000		
X	XX	1	201	2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang di tindaklanjuti	1 Dokumen	1 Dokumen	2.208.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.800.000	3 Dokumen	7.608.000		
X	XX	1	201	3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD di tindaklanjuti	1 Dokumen	2 Dokumen	2.208.000	2 Dokumen	2.600.000	2 Dokumen	2.800.000	6 Dokumen	7.608.000		
X	XX	1	201	6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang ditindaklanjuti	1 Laporan	5 Laporan	2.208.000	5 Laporan	2.600.000	5 Laporan	2.800.000	15 Laporan	7.608.000		

Kode					Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							SKPD													
X	XX	1	201	7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	1 Laporan	26 Laporan	0	26 Laporan	2.600.000	26 Laporan	2.800.000	78 Laporan	5.400.000		
X	XX	1	202		Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi ----- x 100% fasilitasi administrasi keuangan PD yang di rencanakan	100%	85	3.067.017.603	85	3.079.049.603	85	3.081.575.827	85	9.227.643.033		
X	XX	1	202	1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	25 Orang	28/12	3.017.649.603	28/12	3.017.649.603	28/12	3.017.649.603	28/36	9.052.948.809		
X	XX	1	202	2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	12 Dokumen	42.744.000	12 Dokumen	43.000.000	12 Dokumen	43.526.224	36 Dokumen	129.270.224		

Kode					Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X	XX	1	202	3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	3 Dokumen	12 Dokumen	0	12 Dokumen	2.600.000	12 Dokumen	2.600.000	36 Dokumen	5.200.000		
X	XX	1	202	4	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun	2 Dokumen	12 Dokumen	0	12 Dokumen	2.600.000	12 Dokumen	2.600.000	36 Dokumen	5.200.000		
X	XX	1	202	5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Fasilitasi laporan keuangan akhir yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	3.312.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	5.000.000	3 Laporan	12.312.000		
X	XX	1	202	6	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2.600.000	2 Dokumen	2.600.000	6 Dokumen	5.200.000		

Kode					Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X	XX	1	202	7	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Fasilitas laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	2 Laporan	12 Dokumen	3.312.000	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	5.000.000	36 Dokumen	12.312.000		
X	XX	1	202	8	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.600.000	3 Dokumen	5.200.000		
X	XX	1	203		Meningkatnya kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai standar	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah	%	Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah yang dipenuhi ----- x 100% Jumlah fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah yang direncanakan	100	90	8.832.000	90	15.000.000	90	15.000.000	90	38.832.000		

Kode					Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X	XX	1	203	1	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4.416.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	14.416.000		
X	XX	1	203	5	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD yang disusun	2 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	36 Laporan	10.000.000		
X	XX	1	203	6	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD yang disusun	3 Fasilitasi	12 Laporan	4.416.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	36 Laporan	14.416.000		
X	XX	1	206		Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	%	Jumlah fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi ----- 100% fasilitasi administrasi umum PD yang direncanakan	100	90	509.863.422	90	516.967.749	90	520.025.000	90	1.546.856.171		
X	XX	1	206	1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Paket	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	15 Paket	15 Paket	5.337.990	15 Paket	7.942.749	15 Paket	8.000.000	45 Paket	21.280.739		

Kode					Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							Kantor yang Disediakan													
X	XX	1	206	4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	69.082.182	6 Paket	70.000.000	6 Paket	71.000.000	18 Paket	210.082.182		
X	XX	1	206	5	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	27.233.250	2 Paket	28.000.000	2 Paket	29.000.000	6 Paket	84.233.250		
X	XX	1	206	7	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	19.425.000	1 Paket	21.000.000	1 Paket	21.000.000	3 Paket	61.425.000		
X	XX	1	206	9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	388.785.000	12 Laporan	390.025.000	12 Laporan	391.025.000	36 Laporan	1.169.835.000		

Kode					Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X	XX	1	205		Meningkatnya kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai standar	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	%	Jumlah fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi ----- 100% fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD yang direncanakan	0	90	6.624.000	90	83.248.000	90	85.248.000	90	175.120.000		
X	XX	1	205	2	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang disediakan	0 Paket	2 Paket	0	2 Paket	70.000.000	2 Paket	72.000.000	6 Paket	142.000.000		
X	XX	1	205	3	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang disusun	0 Dokumen	2 Dokumen	6.624.000	2 Dokumen	6.624.000	2 Dokumen	6.624.000	2 Dokumen	19.872.000		
X	XX	1	205	5	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	0 Dokumen	2 Dokumen	0	2 Dokumen	6.624.000	2 Dokumen	6.624.000	6 Dokumen	13.248.000		

Kode					Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X	XX	1	207		Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai standar	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	%	Jumlah fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi ----- 100% fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang direncanakan	0	90	1.151.500.000	90	4.237.500.000	90	2.088.500.000	90	7.477.500.000		
X	XX	1	207	1	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	5 Unit	0	5 Unit	0	5 Unit	400.000.000	15 Unit	400.000.000		
X	XX	1	207	6	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	30 Unit	652.000.000	25 Unit	652.000.000	20 Unit	652.000.000	75 Unit	1.956.000.000		
X	XX	1	207	8	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	5 Unit	0	5 Unit	86.000.000	5 Unit	87.000.000	15 Unit	173.000.000		

Kode					Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X	XX	1	207	9	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	499.500.000	2 Unit	499.500.000	2 Unit	499.500.000	6 Unit	1.498.500.000		
X	XX	1	207	10	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	3.000.000.000	1 Unit	450.000.000	2 Unit	6.000.000.000		
X	XX	1	208		Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	%	Jumlah fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi ----- 100% fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	90	795.228.000	90	803.500.000	90	820.500.000	90	2.419.228.000		
X	XX	1	208	2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	385.392.000	12 Laporan	390.000.000	12 Laporan	400.000.000	36 Laporan	1.175.392.000		

Kode					Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
X	XX	1	208	3	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan	1.500.000	12 Laporan	2.500.000	36 Laporan	4.000.000		
X	XX	1	208	4	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	409.836.000	12 Laporan	412.000.000	12 Laporan	418.000.000	36 Laporan	1.239.836.000		
X	XX	1	209		Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai standar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	%	Jumlah fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi ----- 100% fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang direncanakan	100%	90%	584.420.000	90%	393.500.000	90%	551.000.000	90%	1.528.920.000		
X	XX	1	209	2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya yang ditindaklanjuti	22 Kendaraan	28 Unit	191.940.000	28 Unit	198.000.000	28 Unit	202.000.000	84 Unit	591.940.000		

Kode					Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Lapangan	Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
X	XX	1	209	3	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya yang ditindaklanjuti	4 Unit	4 Unit	15.830.000	4 Unit	16.500.000	4 Unit	17.000.000	12 Unit	49.330.000		
X	XX	1	209	6	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	200 Unit	176.850.000	200 Unit	179.000.000	200 Unit	182.000.000	600 Unit	537.850.000		
X	XX	1	209	10	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	199.800.000		1 unit	150.000.000	2 unit	349.800.000			
					Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sesuai standar	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran penduduk	%	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan -----x 100% Jumlah Sasaran Dokumen Pendaftaran penduduk	87,90	93	1.044.967.412	94	1.107.007.412	95	1.124.407.412	95	3.276.382.236		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk sesuai standar	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani pendaftaran penduduk sesuai standar	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani pendaftaran penduduk}}{\text{Jumlah sasaran penduduk yang mengajukan pelayanan pendaftaran penduduk}} \times 100\%$ (Catatan: kriteria pendaftaran penduduk KK,KTP,KIA,SKP)	78.98	80	922.267.412	85	972.407.412	90	977.907.412	90	2.872.582.236		
	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1.658 Dokumen	1.700 Dokumen	28.640.000	1.700 Dokumen	30.000.000	1.700 Dokumen	32.000.000	5.100 Dokumen	90.640.000		
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	KTP : 17.178 Dok. KK : 9.406 Dok. KIA : 29.612 Dok. SKP : 23.853 Dok, Total 80.049 Dok.	80.500 Dokumen	852.827.412	81.000 Dokumen	852.827.412	82.000 Dokumen	852.827.412	243.500 Dokumen	2.558.482.236		Dinas Dukcapil
	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	-	4.500 Penduduk	28.800.000	4.250 Penduduk	30.000.000	4.000 Penduduk	33.000.000	12.750 Penduduk	91.800.000		Sekolah SMP/

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penduduk													
	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.724 laporam	3.000 laporan	0	3.500 laporan	46.080.000	3.500 laporan	46.080.000	10.000 laporan	92.160.000		SMA/SMK/Ponpes
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	200 Dokumen	200 Dokumen	12.000.000	200 Dokumen	13.500.000	200 Dokumen	14.000.000	600 Dokumen	39.500.000		Dinas DUkc apil
	Meningkatnya kualitas Penataan pendaftaran penduduk sesuai standar	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk	%	Jumlah Dokumen blanko KIA yang disediakan ----- -x100% Jumlah dokumen blako KIA yang dibutuhkan	46,76	50	55.500.000	60	58.500.000	70	60.000.000	70	174.000.000		
	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai	Dokumen	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	18.000 Dokumen	10.000 Dokumen	55.500.000	15.000 Dokumen	58.500.000	20.000 Dokumen	60.000.000	45.000 Dokumen	174.000.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penduduk													
	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	-	35 Dokumen	3.510.000	35 Dokumen	5.000.000	35 Dokumen	6.500.000	105 Dokumen	15.010.000		
	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	12 laporan	2.835.000	12 laporan	4.000.000	12 laporan	5.000.000	36 Laporan	11.835.000		
	Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	2 Laporan	6.885.000	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	8.000.000	6 Laporan	22.385.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Penduduk													
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	33.000.000	3 Laporan	37.000.000	9 Laporan	100.000.000		
			Meningkatnya kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sesuai standar		Nilai IKM Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0	90	4.770.000	90	6.600.000	90	8.000.000	90	19.370.000		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	4 Laporan	2.385.000	4 Laporan	3.300.000	4 Laporan	4.000.000	12 Laporan	9.685.000		
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	4 Laporan	2.385.000	4 Laporan	3.300.000	4 Laporan	4.000.000	12 Laporan	9.685.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil Sesuai standar	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Cakil	%	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Sasaran Dokumen Pencatatan Sipil}} \times 100\%$	115	100	471.204.660	100	484.000.000	100	499.000.000	100	1.454.204.660		
	Meningkatnya kualitas pelayanan Pencatatan Sipil sesuai standar	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen Akte Kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Akte Kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk 0-18 tahun}} \times 100\%$	99,68	100	408.859.660	100	416.000.000	100	425.000.000	100	1.249.859.660		
			Persentase Kepemilikan dokumen Akta Perkawinan	%	$\frac{\text{Jumlah Pasangan yang memiliki Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Pasangan yang wajib memiliki Akta Perkawinan}} \times 100\%$	40,75	50		65		70		70	0		
			Persentase Kepemilikan dokumen Akta Perceraian	%	$\frac{\text{Jumlah Pasangan yang memiliki Akta Perceraian}}{\text{Jumlah Pasangan yang wajib memiliki Akta Perceraian}} \times 100\%$	38,18	40		42		45		45	0		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Persentase Dokumen Perubahan Status Anak yang Diterbitkan	%	$\frac{\text{Jumlah Pengajuan Dokumen Perubahan Status Anak}}{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Perubahan Status Anak yang Diterbitkan}} \times 100\%$	3,70	10		10		10		10	0		
			Persentase Kepemilikan Dokumen Perubahan Pewarganegaraan	%	$\frac{\text{Jumlah Pengajuan Perubahan Pewarganegaraan}}{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Perubahan Pewarganegaraan}} \times 100\%$	0	10		10		10		10	0		
			Persentase Kepemilikan Dokumen Kematian	%	$\frac{\text{Jumlah Pengajuan Dokumen Kematian}}{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kematian}} \times 100\%$	168,16	100		100		100		100	0		
	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	Jumlah Pengajuan penerbitan Akta Kelahiran	24.922 Dokumen	26.000 Dokumen	361.819.660	26.500 Dokumen	366.000.000	27.000 Dokumen	370.000.000	79.500 Dokumen	1.097.819.660		
				Dokumen	Jumlah Pengajuan penerbitan Akta Perkawinan	108 Dokumen	130 Dokumen		135 Dokumen		140 Dokumen		405 Dokumen			

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Dokumen	Jumlah Pasangan yang memiliki Akta Perceraian	21 Dokumen	25 Dokumen		30 Dokumen		35 Dokumen		90 Dokumen			
				Dokumen	Jumlah Pengajuan Dokumen Perubahan Status Anak	1 Dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		30 Dokumen			
				Dokumen	Jumlah Pengajuan Perubahan Pewarganegaraan	0 Dokumen	20 Dokumen		20 Dokumen		20 Dokumen		60 Dokumen			
				Dokumen	Jumlah Pengajuan Dokumen Akta Kematian	13.243 Dokumen	15.000 Dokumen		15.500 Dokumen		16.000 Dokumen		46.500 Dokumen			
				Pelayanan	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	4 Pelayanan	4 Layanan	47.040.000	4 Layanan	50.000.000	4 Layanan	55.000.000	12 Layanan	152.040.000		
				%	Jumlah penduduk yang mengajukan pelayanan pencatatan sipil -----x 100% Jumlah sasaran penduduk yang diintervensi pencatatan sipil sesuai standar	100%	100	57.575.000	100	61.500.000	100	66.000.000	100	185.075.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	10 Laporan	12 Laporan	8.320.000	12 Laporan	9.500.000	12 Laporan	11.000.000	36 Laporan	28.820.000		
	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	-	12 Laporan	2.835.000	12 Laporan	3.500.000	12 Laporan	4.000.000	36 Laporan	10.335.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2 Laporan	2 Laporan	9.360.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	11.000.000	2 Laporan	30.360.000		
		Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil		35 Dokumen	3.760.000	35 Dokumen	4.500.000	35 Dokumen	5.000.000	105 Dokumen	13.260.000		
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Orang	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	3 Laporan	3 Laporan	33.300.000	3 Laporan	34.000.000	3 Laporan	35.000.000	9 Laporan	102.300.000		
		Meningkatnya kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil sesuai standar	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Nilai IKM Pelayanan Pencatatan Sipil	%	Nilai IKM Pelayanan Pencatatan Sipil	0	90	4.770.000	90	6.500.000	90	8.000.000	90	19.270.000		
		Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	0 Laporan	4 Laporan	1.485.000	4 Laporan	2.500.000	4 Laporan	3.000.000	12 Laporan	6.985.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	3 Laporan	4 Laporan	3.285.000	4 Laporan	4.000.000	4 Laporan	5.000.000	12 Laporan	12.285.000		
	Terselenggaranya PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Sesuai standar	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase lembaga yang telah memanfaatkan informasi administrasi kependudukan	%	Jumlah lembaga yang telah memanfaatkan informasi administrasi kependudukan -----x 100% Jumlah lembaga yang telah memiliki hak akses catatan: lembaga yang telah memanfaatkan data adalah lembaga yang memberikan data balikan	93	100	1.439.078.000	100	1.482.882.000	100	1.411.462.000	100	4.333.422.000		
	Meningkatnya kualitas Data Kependudukan yang disajikan sesuai standar	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang disajikan sesuai standart	%	Jumlah data kependudukan yang disajikan sesuai standart -----x 100% Jumlah data kependudukan yang ada	-	90	27.840.000	90	30.000.000	90	31.000.000	90	88.840.000		
	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	16 Dokumen	27 Dokumen	5.760.000	27 Dokumen	7.000.000	27 Dokumen	7.000.000	81 Dokumen	19.760.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			an													
	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		12 Dokumen	22.080.000	12 Dokumen	23.000.000	12 Dokumen	24.000.000	36 Dokumen	69.080.000		
	Meningkatnya kualitas dokumen tata cara pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang sesuai dengan standar	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase dokumen tata cara pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang sesuai dengan standar	%	Jumlah dokumen tata cara pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang sesuai dengan standar -----x 100% Jumlah Dokumen yang seharusnya disusun	-	100	76.420.000	100	76.420.000	100	76.420.000	100	229.260.000		
	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi yang Disusun	-	4 dokumen	76.420.000	4 dokumen	76.420.000	4 dokumen	76.420.000	12 Dokumen	229.260.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Kependudukan yang Disusun													
	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan sesuai standar	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah Yang Mengimple mentasikan Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan	%	Jumlah Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang memanfaatkan Data Administrasi Kependudukan -----x 100% Jumlah Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang mengajukan	78	90	314.562.000	90	285.022.000	90	289.022.000	90	888.606.000		
	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	12 Laporan	2.070.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	4.000.000	36 Laporan	30.000.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Dokumen	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	2 Dokumen	4 Dokumen	0	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	48.000.000		
		Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	13 Laporan	70.070.000	13 Laporan	23.670.000	13 Laporan	23.670.000	39 Laporan	30.000.000		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	4 Dokumen	109.848.000	4 Dokumen	109.848.000	4 Dokumen	109.848.000	12 Dokumen	329.544.000		
		Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	55.935.000	2 Laporan	55.935.000	2 Laporan	55.935.000	6 Laporan	167.805.000		
		Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	-	35 Dokumen	6.070.000	35 Dokumen	7.000.000	35 Dokumen	10.000.000	105 Dokumen	23.070.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Tinggi													
	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 Laporan	3 Dokumen	70.569.000	3 Dokumen	70.569.000	3 Dokumen	70.569.000	9 Dokumen	211.707.000		
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai standar	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Nilai IKM Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	Nilai IKM Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	90	1.020.256.000	90	1.091.440.000	90	1.091.440.000	90	3.203.136.000		
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	4 Laporan	936.360.000	4 Laporan	1.004.840.000	4 Laporan	1.004.840.000	12 Laporan	2.946.040.000		
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	3 Laporan	4 Laporan	83.896.000	4 Laporan	86.600.000	4 Laporan	86.600.000	12 Laporan	257.096.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Pendayagunaan Data Kependudukan	Data Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Pendayagunaan Data Kependudukan											
		Terselenggaranya pemanfaatan PROFIL KEPENDUDUKAN Sesuai standar	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan Profil Kependudukan	%	<p>Jumlah data profil kependudukan yang tersusun dan dimanfaatkan</p> <p>-----x</p> <p>100%</p> <p>Jumlah data profil kependudukan yang ada</p>	N/A	90	6.210.000	90	17.500.000	90	23.000.000	90	46.710.000		
		Meningkatnya kualitas profil Kependudukan sesuai standar	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Ketercukupan komponen data dalam profil kependudukan	%	<p>Jumlah komponen data kependudukan dalam profil kependudukan</p> <p>----- x</p> <p>100%</p> <p>Jumlah komponen data kependudukan yang seharusnya ada di profil kependudukan catatan:sesuai dengan permendagri 65 tahun 2010</p>	0 Laporan	62,50	6.210.000	66,67	17.500.000	70,83	23.000.000	70,83	46.710.000		
		Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0 Laporan	4 Dokumen	0	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	11.000.000	12 Dokumen	21.000.000		

Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 dokumen	4	6.210.000	4	7.500.000	4	12.000.000	12	25.710.000		

Pada pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan seperti yang tertuang dalam Tabel TC.27 diatas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan sumberdana APBD dalam DAU.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra DisdukCapil Tahun 2024- 2026

Perencanaan Strategis PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tahun 2024 – 2026 memuat langkah-langkah strategis tugas-tugas penyelenggaraan sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan. Berikut indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024 - 2026.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	Tahun 2026
1	Indeks pelayanan publik	Angka	4,00 (Baik)	81 (Sangat Baik)	83 (Sangat Baik)	85 (Sangat Baik)	85 (Sangat Baik)
2	Persentase Jumlah Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan yang dicetak sahaja(satu hari jadi)	%	87	89	90	92	92

7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel TC-28 berikut ini :

Tabel 7.2 T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya Reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	Angka	Hasil penghitungan Indeks pelayanan publik kabupaten	4,00 (Baik)	81 (Sangat Baik)	83 (Sangat Baik)	85 (Sangat Baik)	85 (Sangat Baik)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Persentase Jumlah Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan yang dicetak sahaja service	%	Jumlah Dokumen Adminduk yang sudah diterbitkan sahaja (satu hari jadi) service -----x 100% Target Sasaran Dokumen Adminduk yang seharusnya diterbitkan (Catatan:kriteria layanan sahaja KK,KTP,KIA,SURAT PINDAH,AKTA)	87	89	90	92	92
	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Sesuai standar	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang terpenuhi -----x 100% Fasilitasi Operasional Perkantoran yang rencanakan	66,66	90	90	90	90
	Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sesuai standar	Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran penduduk	%	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan -----x 100% Jumlah Sasaran Dokumen Pendaftaran penduduk	87,90	93	94	95	95
	Terselenggaranya Pelayanan Pencatatan Sipil Sesuai standar	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan -----x 100% Jumlah Sasaran Dokumen Pencatatan Sipil	115	100	100	100	100

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sesuai standar	Persentase lembaga yang telah memanfaatkan informasi administrasi kependudukan	%	$\frac{\text{Jumlah lembaga yang telah memanfaatkan informasi administrasi kependudukan}}{\text{Jumlah lembaga yang telah memiliki hak akses catatan: lembaga yang telah memanfaatkan data adalah lemabaga yang memberikan data balikan}} \times 100\%$	93	100	100	100	100
	Terselenggaranya pemanfaatan Profil Kependudukan Sesuai standar	Persentase pemanfaatan Profil Kependudukan	%	$\frac{\text{Jumlah data profil kependudukan yang tersusun dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah data profil kependudukan yang ada}} \times 100\%$	N/A	90	90	90	90

Hasil penentuan target tujuan dan sasaran serta kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 diharapkan dapat tercapai dengan baik dalam realisasi kinerja pada setiap tahunnya. Sehingga pencapaian target tersebut dapat berdampak sangat signifikan dalam membantu pembangunan daerah khususnya dalam urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lumajang.

BAB VIII

PENUTUP

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang 2024 - 2026 ini dapat disusun. Tersusunnya Renstra PD ini tidak lepas dari kerja Tim Renstra PD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang. Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu 3 tahun sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Penyusunan Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan pedoman penyusunan laporan tahunan yaitu pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan, pedoman penyusunan Program Kerja Tahunan, pedoman penyusunan Laporan Kinerja (LKj), pedoman pembuatan LKPJ, dan pedoman penyusunan LPPD.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 dapat dilakukan upaya kajian dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Program, Kegiatan, dan Indikator Kegiatan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang secara keseluruhan sebagai wujud memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Demikian Renstra PD ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 - 2026. Disadari bahwa dalam penyusunan Renstra PD ini masih terdapat keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Semoga Rencana Strategis PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya dan masyarakat Lumajang pada umumnya.

Lumajang, Mei 2023

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil


AGUS WARSITO UTOMO, S.Pd., M.Si
NIP. 19650819 199203 1 010